DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
Jalan R.M Thaher Telp. (0747) 21245
MUARA BUNGO

SALINAN

RISALAH RESMI

Tahun	:	2018
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Senin, 20 Agustus 2018
Pukul	:	10.00 Wib s/d Selesai
Tempat	:	Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
Pimpinan Rapat	:	H. Kamal. HG/Wakil Ketua DPRD Didampingi: Syarkoni Syam./ Wakil Ketua DPRD
Acara	:	Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.
Sekretaris Rapat	:	Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
Hadir	:	A. 25 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:

1. **Fraksi Demokrat**
   2 dari 6 orang Anggota
2. **Fraksi Golkar**
   5 dari 5 orang Anggota
3 **Fraksi Hati Nurani**
   4 dari 4 orang Anggota
4. **Fraksi PDI-Perjuangan**
   3 dari 4 orang Anggota
5. **Fraksi PAN**
   2 dari 3 orang Anggota
6. **Fraksi Gerinda**
   2 dari 3 orang Anggota
7. **Fraksi PKS**
   3 dari 3 orang Anggota

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

8. Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa

2 dari 4 orang Anggota

9. Fraksi Bintang Pembangunan

2 dari 3 orang Anggota

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
3. Usman, S.Pd / Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
4. M.Marhabi, S.Sos / Kasubbag Fasilitasi dan Penganggaran
5. Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
6. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi

Turut Hadir : 1. Bupati dan Wakil Bupati Bungo

2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo
3. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati Bungo, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
4. Kepala OPD dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kab. Bungo
5. Para Camat dan Lurah dalam kabupaten Bungo;
6. Para Wartawan

Pembawa Acara : Marlina Juita, SE / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo. Kepada Bapak H. Kamal.HG disilahkan dengan segala hormat

Pimpinan Rapat : H. Kamal. HG / Wakil Ketua DPRD Kab. Bungo

(Rapat di buka pukul 11.10 Wib)

Assalamuaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum rapat paripurna ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan.

Sekretaris DPRD : **Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD**

Jumlah hadir Anggota DPRD Kabupaten Bungo

Dari 35 orang Anggota DPRD Kab. Bungo hadir dan telah mendatangani daftar hadir sebanyak 25 orang dan tidak hadir sebanyak 10 orang.

Keterangan :

IZIN 5 Orang :

1. Ria Mayang Sari, SH, MH (Fraksi Demokrat)
2. Syaiful Acik Bilal, S.pd.I (Fraksi Demokrat)
3. Leni Elvira, Z. SE (Fraksi Demokrat)
4. Karwati (Fraksi Demokrat)
5. Saiful Bakhri, S. pd. I (Restorasi Kebangkitan Bangsa)
6. Suryani (Restorasi Kebangkitan Bangsa)
7. Aljubri, S.Pd.I (PDI Perjuangan)
8. Drs. Winarno (PAN)
9. Alex Cander (Gerindra)
10. Desmiati, ST (Bintang Pembangunan)

Demikian,

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah Anggota Dewan 35 orang, yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 25 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna tentang Rancangan Perda, berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Bungo Nomor 1 Tahun 2015, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan "BISMILLAHIRRAMAN-NIRROHIM" Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum, SKOR Saya cabut.

----------Ketukan Palu 1x----------

- Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Bungo;
- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo atau yang mewakili;
- Yth. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, Saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di gedung yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk sehingga kita berada dalam kondisi yang baik seperti saat ini dan semoga kita mendapat syafa'at Beliau di yaumil mahsyar.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia...

Pelaksanaan rapat Paripurna pada hari ini adalah tindaklanjut dari Rapat Paripurna sebelumnya, yang diadakan pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan agenda Penandatangan Nota Kesepatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan yang kedua yaitu yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021. Hal tersebut adalah merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari kewenangan DPRD dalam membentuk Perda adalah melakukan pengkajian, penelitian, dan pembahasan terhadap Ranperda yang diajukan oleh Bupati. Kegiatan tersebut bertujuan untuk harmonisasi, sinkronisasi dan penyempurnaan terhadap Ranperda yang diajukan oleh Bupati. Salah satu output dari kegiatan ini berupa pandangan dan pendapat yang terakumulasi melalui penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD.

Baiklah, sesuai dengan mekanisme persidangan dan tata teritb DPRD Kabupaten Bungo, maka marilah bersama-sama kita dengar dan simak bersama Pandangan Umum Fraksi

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

DPRD yang akan disampaikan oleh salah satu fraksi , mewakili seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Bungo dari Fraksi Golkar, Saya persilahkan kepada **Sdr. Z. ARIFIN, S.H. M.H**

Juru Bicara : Z. ARIFIN, S.H. M.H (Fraksi Golkar)

ASSALAMUALAIKUM Wr Wb,

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bungo;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo;

Yth. Segenap Anggota FORKOMPIMDA, Ketua Pengadilan Negeri Muara bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati Bungo serta Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;

Yth. Seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;

Yth. Segenap Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan Bank Beserta Pimpinan BUMN/BUMD dalam Kabupaten Bungo;

...**Para Hadirin Yang Berbahagia...**

Mengawali Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bungo dalam Sidang Paripurna yang ke dua hari ini, Senin, 20 Agustus 2018, izinkanlah Saya atas nama Fraksi GOLKAR mengajak kita semua, untuk mempersembahkan puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Penyempaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang Perubahan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021.

Kemudian Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan segenap Sahabatnya yang telah memberikan keteladanan dan pegangan tata cara hidup beragama, berbangsa dan benegara untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berilmu pengetahuan sebagai modal dasar kita dalam mengisi Pembangunan di ***Bumi Langkah serentak Limbai Seayun*** untuk meneruskan kebangkitan Bangsa dalam konteks Pembangunan Nasional.

Izinkan kami mengajak seluruh pemangku kebijakan di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun untuk menyatukan kerangka berpikir kita dalam mengisi kemerdekaan. Kesatuan dari rangka berpikir akan membuat kita kuat dalam arah pembangunan daerah. Paripurna kali ini terasa begitu spesial karna kita masih berada disuasana Kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang Ke-73. Melalui Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini juga secara khusus mengucapkan ***Dirgahayu RI Ke-73, semoga Indonesia semakin Jaya dalam kemajemukannya.***

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Melalui kesempatan ini, atas nama Fraksi GOLKAR, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan sidang yang

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

telah memberikan kesempatan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pendangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bungo, terima kasih pula kami sampaikan kepada Bupati Bungo yang telah menyampaikan Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, kami 9 (Sembilan) Fraksi DPRD Kabupaten Bungo menyampaikan apresiasi kepada Saudara Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja keras menuntaskan pembahasan terhadap Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021.

FRAKSI DEMOKRAT

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Setelah melalui proses panjang, rapat - rapat dan diskusi serta setelah mencermati dan mempelajari tentang :

1. Adanya peleburan, pemisahan dan penggabungan perangkat daerah sebagai akibat dari penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Penting dan perlunya penajaman permasalahan dan isu strategis yang sesuai dengan kondisi internasional, nasional, provinsi dan Kabupaten Bungo.
3. Penyesuaian program dan kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, Prioritas Daerah dan capaian

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Pembangunan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome*)

4. Pentingnya upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kabupaten bungo yang berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi.

Untuk itu Fraksi Demokrat memberikan pandangan secara umum.

RPJMD Kabupaten Bungo tahun 2016-2021 Sebagai pedoman pembangunan 5(tahun, penyusuna RPJMD kabupaten Bungo tahun 2016-2021 mempedomani RPJM Nasional Tahun 2014-2019, RPJMD merupakan penjabaran dari visi,misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serata program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendaaan bersifat indikatif. RPJMD kabupaten Bungo 2016-2021berkaitan dengan beberapa hal:

1. Tujuan pembangunan dan indikator pembangunan Sumber daya manusia dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan yang mengambarkan tercapaian tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapai outcome program perangkat daerah, ada pun sasran pembangunan daerah dalam revisi RPJMD Kabupatan Bungo tahu 2016-20121

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

2. Sasaran OPD dan program OPD bahwa indeks kepuasan masyarakat(IKM)terhadap pelayanan public dikabupaten bungo tahun 2016 masih dibawah 50% bahkan sudah ada lima laporan resmi pengaduan pelayanan public kabupaten bungo ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi permasalan utama penyebab lemahnya pelayann public dikabupaten bungo adalah masih lemah system pelayanan public dikabupaten bungo nterutama OPD-OPD yang langsung menangani pelayanan public ke masyarakat,kondisi ini makin membuat nilai penyelenggaran pemerintah darah semangkin menurun, MOHON PENJELASAN

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati.

Setelah kami pelajari dan melihat data yang disampaikan dalam buku perubahan RPJMD,Hasil analisi terhadap pengukuran kinerja,komponen nilai akuntabilitas kinerja pemerintah itu sendiri terdiri dari unsure rencaan,pengukuran pelaporan,evaluasi dan capaian kinerja

Karna ada perubahan RPJMD ini sebagai dokumen publik yang merangkum rencana pembangunan lima tahun diurusan bidang pemerintahan yang bersifat wajib dan bidang pemerintahan yang bersifat pilihan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi misi dan indikatif program dalam dokumen ini hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan bersama pemangku kepentingan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

berdasarkan peran dan kewenangan masing - masing dengan meintergrasikam program nasional, provinsi dan Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan dan menganlisa isu strategi internasional, nasional dan lokal.Dalam peraturan mentri dalam negri Repuplik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan berita Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 517, dalam sistem perencanan pembangunan nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanan pembangunan daerah yang diatur dalam undang undang nomor 25 tahun 2004, oleh karena itu perubahan RPJMD kabupaten bungo merupakan bagian yang terintergrasi dengan perencanaan pembangunan nasional,yang bertujuan utunk mendukung koodinasi antar pelaku pembanngunan,sehingga perubahan RPJMD harus sinkron senergi antar daerah,antar waktu,antar ruangan dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan kosisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, hal ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan,Hasil FGD meninformasikan bahwa belum semua organisasi perangkat Daerah (opd) dilingkungan kabupaten Bungo memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP),Bahkan Sampai dengan 2016,pesentase OPD yang menyusun dan menerapkan SPM dan SOP baru sekitar 22,41%.Tahun 2017 persentase OPd tersebut naik menjadi

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

29,55%,Namun jumlah OPD yang menyusun dan menerapkan SPM dan SOP masih tetap 13,hanya jumlah OPD keseluruhan yang berkurang menjadi 44 dan awalnya 58 disamping itu terintergrasinya aplikasi system informasi dilingkungan pemerintah kabupaten Bungo menambah lambatnya kinerja pemerintah daerah ,bahkan sampai tahu 2017 baru ada 14 aplikasi system informasi daerah yang dikelola OPD itu pun masih secara persial,Hal ini menyebabkan nilai penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten Bungo menurun adalah tingkat kesesuaian Restra OPD dengan RPJMD Hanya 55%,Sehingga banyak kegiatan yang belum mendukung tujuan pembangunan daerah.

Kami dari fraksi Demokrat mohon PENJELASAN Dalam perubahan RPJMD yang disampaikan oleh pihak eksekutif dalam nota pengantar RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016.

FRAKSI GOLKAR

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, tentu harus mengacu pada

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

dokumen dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD seperti yang terdapat di Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada hakikatnya Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dimaksud adalah untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan yang sifatnya nasional agar terjadi kesesuaian antar pelaku pembangunan sehingga perubahan RPJMD terhindar dari ketimpangan di dalam pembangunan RPJMD Kabupaten Bungo.

Setelah mencermati Nota Pengantar yang telah dibacakan oleh saudara Wakil Bupati pada Rapat Paripurna beberapa hari yang lalu, Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 Fraksi Partai Golkar memberi pandangan sebagai berikut :

1. Dalam Nota Pengantar Bupati yang disampaikan pada Tanggal 13 Agustus 2018, Fraksi Golkar mempertanyakan apakah Visi dan Misi Bupati Bungo dalam Perubahan RPJMD telah terukur dengan jelas untuk penerapan dan pengimplementasinya dalam setiap tahun, Mohon Penjelasan ?
2. Dengan bebrapa Indikator Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo yang tergambar dalam Nota Pengantar yang disampaikan Bupati, Fraksi Golkar mempertanyakan, Apakah Bupati dan Wakil Bupati mampu mengimplementasikan Visi, Misinya " Bungo Maju dan sejahtera" mengingat waktu tinggal tiga tahun lagi. Mohon Penjelasannya ?

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

3. Menurut hemat Fraksi kami indikator sasaran pembangunan harus di imbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni, untuk itu Fraksi Golkar minta penjelasan kepada Pemerintah dalam hal Program peningkatan SDM ini.
4. Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo tentang sasaran Pembangunan, Fraksi Golkar mempertanyakan apa sasaran program yang lebih diperioritaskan? Fraksi kami juga mempertanyakan apa ada kegiatan-kegiatan pembangunan strategis yang akan muncul pada APBD-P 2018 maupun APBD Murni 2019. Harapan fraksi kami harus mensinergikan program yang lebih diprioritaskan tersebut dengan hasil Musrenbang Kecamatan tahun-tahun sebelumnya serta usulan-usulan hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo menjadi prioritas utama. **Mohon penjelasannya**
5. Pentingnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilingkungan kerjanya merupakan suatu kewajiban bagi OPD. karena sampai dengan 2016 baru sekitar 22,41 % OPD yang menyusun dan menerapkan SPM dan SOP, tahun 2017 naik menjadi 29, 55 % atau masih 13 OPD dari 44 OPD. Itu berarti ada 31 OPD yang belum menyusun dan menerapkan SPM dan SOP, mengenai hal ini **mohon tanggapannya?**

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Golkar berkeyakinan dan berharap bahwa kerangka pembangunan kedepan itu akan lebih baik dari periode yang sudah berjalan ini. Keberhasilan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dicapai pada periode yang lalu hendaknya harus ditingkatkan. Kita perlu menumbuhkan kepercayaan diri warga masyarakat Bungo bahwa kita mampu berbuat untuk kemajuan dan kesejahteraan itu. Dengan kepercayaan diri yang tercipta, akan muncul ide, gagasan dan pemikiran yang cemerlang, yang akan mempercepat dalam mewujudkan tujuan bersama itu.

FRAKSI HANURA

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Dalam pembahasan perubahan RPJMD ini kami meminta kepada pihak eksekutif agar selalu melengkapi data-data sebelumnya, sehingga kita dapat secara transparan dan mampu secara nyata mengetahui dan memaharninya.

Setelah mencermati Nota Pengantar Sdr. Bupati, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa pandangan :

1. Dengan diadakannya peleburan, pemisahan dan penggabungan Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo dengan jumlah OPD keseluruhan berkurang menjadi 44, kenapa sampai saat ini hanya 13 OPD saja yang baru menyusun dan menerapkan SPM dan SOP atau hanya sekitar 29,55%, hal ini dapat berpengaruh terhadap lambatnya kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo. Hal lain yang

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

menyebabkan menurunnya nilai penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bungo adalah tingkat kesesuaian Renstra OPD dengan RPJMD hanya 55%, sehingga banyak kegiatan yang belum mendukung tujuan pembangunan Daerah. Mohon dijelaskan.

2. Di dalam Perubahan RPJMD ini Fraksi Hati Nurani mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah, sejauh mana perhatian dalam melakukan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bungo. Mohon dijelaskan.
3. Hal yang tidak kalah penting, bahwa program-program yang telah tersusun ini harus segera dilaksanakan secara nyata, sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai, sehingga Perubahan RPJMD ini tidak hanya bersifat teori saja, tetapi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat Kabupaten Bungo.

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Fraksi Hati Nurani berharap kepada Saudara Bupati beserta jajarannya agar catatan penting yang kami sampaikan dalam Pandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

FRAKSI PDI-P

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang Berbahagia

Mengawali Pandangan Umum ini, Fraksi PDI perjuangan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak eksekutif karena sudah mengambil langkah cepat dalam rangka menyesuaikan langkah-langkah karena adanya perubahan regulasi/peraturan dari pemerintah pusat. Dan kami berharap langkah yang cepat tersebut hendaknya dilakukan dengan tetap memperhatikan proses, prosedur dan pertimbangan matang dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Setelah mencermati Nota Pengantar yang telah dibacakan oleh saudara Wakil Bupati pada Rapat Paripurna beberapa hari yang lalu, Fraksi PDI Perjuangan menangkap alasan dari Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 karena adanya kebijakan nasional dan beberapa hal-hal lainnya yang tertera pada nota pengantar Bupati. Berdasarkan alasan tersebut maka Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 mengakomodasi empat hal yaitu :

1. Adanya peleburan, pemisahan dan penggabungan perangkat daerah sebagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Penting dan perlunya penajaman permasalahan dan isu strategis yang sesuai dengan kondisi internasional, nasional, provinsi dan Kabupaten Bungo.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

3. Penyesuaian program dan kegiatan yang mendukung prioritas daerah dan capaian Pembangunan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan indicator kinerja utama (IKU) dan indicator kinerja kunci (IKK) yang lebih berorientasi pada hasil (outcome)
4. Pentingnya upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Bungo yang berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan 4 hal diatas untuk itu Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan bahwa bahwa pada hakikatnya Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dimaksud adalah untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan yang sifatnya nasional agar terjadi kesesuaian dan untuk menghindari ketimpangan di dalam pembangunan RPJMD Kabupaten Bungo yang harus disusun berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat pusat dan daerah tetap mengacu kepada UU Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perubahan regulasi ini akan sangat berpengaruh kepada rencana pembangunan Jangka menengah daerah.

Perubahan RPJMD ini sebagai dokumen public yang merangkum rencana pembangunan lima tahun bidang pemerintahan yang bersifat wajib dan bersifat pilihan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi misi serta indikatif program dalam dokumen ini. Dokumen ini

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

adalah hasil dari kesepakatan para pelaku pembangunan bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran serta kewenangannya masing-masing dengan mengintegrasikan program nasional, provinsi dan Kabupaten Bungo dengan menganalisa isu strategis Internasional, nasional dan local.

Mencermati dokumen Perubahan RPJMD yang kami pelajari, kami melihat bahwa belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Kabupaten Bungo yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), karena sampai dengan 2016 baru sekitar 22,41 % OPD yang menyusun dan menerapkan SPM dan SOP, tahun 2017 naik menjadi 29, 55 % atau masih 13 OPD dari 44 OPD. Itu berarti ada 31 OPD yang belum menyusun dan menerapkan SPM dan SOP, **mohon penjelasannya**.

Disamping itu juga, berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD kami juga melihat belum terintegrasinya aplikasi e-government dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Bungo yang menambah lambatnya kinerja Pemerintah Daerah, bahkan sampai dengan tahun 2017 baru ada 14 aplikasi system informasi daerah yang dikelola oleh OPD, itupun masih secara parsial. **Dan mohon juga penejelasannya**

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang Berbahagia

Fraksi PDI Perjuangan berharap dalam perubahan ini agar dikaji secara komperensif dengan membandingkan hasil pencapaiannya sehingga kita mampu mencapai visi misi Bungo Mas Sejahtera, pembahasan RPJMD perubahan ini kami minta

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

kepada pihak eksekutif agar selalu melengkapi dengan data-data sebelumnya, sehingga kita dapat secara transparan dan mampu secara nyata mengetahui dan memahaminya, mampu menjawab serta mensinkronisasikan dengan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan RPJMD Perubahan Kabupaten Bungo serta dalam penyusunannya harus sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Selanjutnya, penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bungo dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Pembahasan Materi
3. Penutup

I. PENDAHULUAN

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah terpilih, yang memuat kondisi daerah, strategi, arah, kebijakan program pembangunan yang mengacu pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026. Dokumen publik ini di susun dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih optimal serta merupakan akuntabilitas publik pemerintah daerah. RPJMD juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra 0PD), yang dijadikan rujukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Daerah (RKPD) yang berisi indikator kinerja yang akan dicapai dan dijadikan acuan dalam penyusunan kegiatan oleh OPD dalam setiap tahunnya.

Untuk itu, mengingat betapa krusial fungsi dari RPJMD 2016-2021 menjadi rujukan pembangunan 5 tahun, maka dibutuhkan kemauan dan kemampuan politik dari seluruh pemangku kepentingan dalam mencermati agar nantinya dapat direalisasikan dan dirasakan dampak pembangunannya secara nyata oleh masyarakat di Kabupaten Bungo.

II. PEMBAHASAN MATERI

Dasar perubahan RPJMD selain karena adanya krisis ekonomi global yang berdampak pada perekonomian Nasional, Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Bungo sehingga berpengaruh pada capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kinerja pembangunan daerah. Disamping itu adanya perubahan dasar hukum yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap RPJMD tahun 2016-2021, yakni ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan kewenangan tata kelola pemerintahan, antara lain:

1. PP nomor 18 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan Pasal 232 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP nomor 17 tahun 2017 tentang Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

3. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan,Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
4. SE Mendagri nomor 050/4936/SJ dan Menteri Negara PPN/KBPN nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Juklak Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2014 – 2019.

Setelah melakukan pencermatan secara mendalam terhadap Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo 2016-2021, Kami Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bungo memberikan beberapa catatan, pertanyaan untuk lebih menyempurnakannya sebagai berikut :

1. Perubahan RPJMD nantinya menjadi guidance arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bungo 5 tahun periode ini yang telah berjalan selama 2 tahun, sehingga harus jelas dan terukur secara kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2. Terkait dengan target indikator kinerja dan kinerja sasaran harus lebih terukur dan realistis sehingga memudahkan perangkat daerah dalam menyusun program kerja.
3. Tujuan dari Misi 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo tentang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan bertujuan mendorong

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

ketersediaan infrastruktur yang merata untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastuktur daerah dengan indikator kerja indeks infrastruktur daerah. Kami belum melihat penjabaran angka – angka target dan capaian infrastruktur tersebut selain indeks yang disajikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Mohon penjelasan ...?

Untuk peningkatan Kualitas pemukiman kami juga belum melihat dengan jelas capaian kinerja dan target kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Mohon penjelasan...?

4. Terkait sasaran pembangunan yang sebelumnya ada 23 sasaran menjadi 11 sasaran namun tertulis ada 10 sasaran. Mohon penjelasannya....?

Dari 10 sasaran tersebut pada sasaran ke 3 kami melihat orientasinya hanya pada bidang pendidikan umum saja dan tidak menyentuh sama sekali bidang pendidikan agama (Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan pondok pesantren serta rumah – rumah tahfiz).

Yang semua itu juga merupakan tempat penempaan anak – anak yang juga belajar pendidikan umum 30 %, serta disini di tempa siang dan malam agar mereka memiliki ahlakul kharimah yang baik juga menjadi aset daerah kita. Mohon tanggapannya....

5. Terhadap indikator kinerja dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan 6

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

indikator yang kami anggap masih sangat lemah dan kurang tajam untuk bisa terwujud hal tersebut. Kami memandang perlu penambahan indikator khususnya terhadap OPD terkait sehingga usaha kita bersama menuju Wajar Tanpa Pengecualian betul – betul bisa terwujud dan bisa dipertahankan. Mohon tanggapan....?

6. Terhadap peningkatan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo khususnya program Penyelenggaraan Urusan peningkatan Kapasitas Lembaga Sekretariat Daerah, kami memandang harus selaras dan sejalan dengan OPD – OPD, khususnya OPD pengusul Raperda. Karena selama ini kami melihat lemahnya OPD dan terbatasnya Tenaga di Bagian Hukum Setda yang mengakibatkan Lambannya Pembahasan Ranperda yang berdampak pada terlambatnya Pengesahan Ranperda menjadi Perda, ketidak siapan OPD – OPD menyiapkan dokumen – dokumen serta kurang singkronnya program kerja dengan ketersediaannya anggaran yang juga menjadi penyebab keterlambatan tersebut. Untuk itu kami mohon penjelasannya.....
7. Terkait dengan sasaran pembanguan kami Fraksi PAN memandang perlu penambahan sasaran di bidang Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Bungo yang belum ter expose keluar dan masih dibutuhkan sentuhan – sentuhan Pemerintah Daerah

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

untuk percepatan Pembangunan di kawasan wisata tersebut, baik dari segi infrastruktur jalan maupun pembangunan pendukung serta promosinya ke luar daerah, hal ini juga akan berdampak langsung terhadap perkembangan ekomoni masyarakat dusun secara langsung dan PAD dusun bisa meningkat. Mohon tanggapannya....

8. Terkait dengan sasaran OPD yang semula tidak ada menjadi 43 poin, dengan indikator program OPD 312 poin, berkurang menjadi 111 poin. kami Fraksi PAN memandang tidak balance. Karena dari logika, kami berpikir bahwa sasarannya tidak ada indikatornya 312 poin, sedangkan sekarang sasarannya 43 poin, indikatornya hanya 111 poin. Dari sisi penambahan sasaran kami mengapresiasi Pemerintah Daerah agar terciptanya OPD – OPD yang tangguh dan handal dalam mencapai Bungo Maju dan Sejahtera tahun 2021. Namun di sisi pengurangan indikator tersebut kami pesimis akan terwujud OPD yang tangguh dan handal. Mohon penjelasan.....
9. Kami memandang dari indikator peningkatan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta Peningkatan Pajak Daerah angkanya masih sangat minim dalam angka – angka yang di pasang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kami Fraksi PAN memandang – mandang Angka – angka tersebut adalah angka – angka pesimis yang di

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

pasang tidak singkronnya dengan indikator – indikator yang ditetapkan.

Mohon penjelasan....

10. Hal yang tidak kalah penting bahwa program-program pembangunan yang telah tersusun ini harus segera diikuti strategi langkah yang riil atau nyata sehingga bisa di evaluasi tentang hasil yang telah dicapai, sehingga RPJMD ini tidak hanya bersifat teoritik dan normatif saja tetapi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bungo dalam rangka mewujudkan Bungo Maju dan Sejahtera tahun 2021.

III. PENUTUP

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bungo kami sampaikan, semoga bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua fihak yang berkepentingan guna menyempurnakan RPJMD 2016-2021. Semoga cita-cita mewujudkan visi " Terwujudnya masyarakat Bungo Maju dan Sejahtera tahun 2021 " betul-betul bisa direalisasikan. Dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian. Amin, Amin Ya Robbal Alamin.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

FRAKSI GERINDRA

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Beberapa Setelah mencermati hal yang telah diakomodasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo atas Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, maka Fraksi Gerindra perlu memberikan pandangan fraksi secara umum, sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk menjalankan perubahan tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masajabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2014-2019. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 , tentu harus mengacu pada dokumen dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD seperti yang terdapat di Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai bagian pijakan untuk mengambil tema-tema pembangunan selanjutnya. Apakah Perubahan RPJMD ini telah sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri tersebut?, Karena RPJMD adalah bagian dari petikan 5 tahun tujuan jangka panjang. Banyak program dan kegiatan yang harus dituntaskan dalam mencapai tujuan tersebut, khususnya yang tertuang pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bungo 2016-2021.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Dalam pandangan umum ini, Fraksi Gerindra perlu menanyakan beberapa hal persoalan dalam RPJMD, diantaranya:

1. Materi pertama adalah Tujuan Pembangunan yang sebelumnya 10 poin dan dalam Perubahan RPJMD 2016-2021 ini menjadi 5 poin, Indikator Tujuan Pembangunan, yang sebelumnya tidak ada menjadi 5 poin, dan Sasaran Pembangunan yang sebelunya 23 poin menjadi 10 poin . Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD karena hal tersebut yang menggambarkan akan tercapainya tujuan yang berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

   Pertanyaannya : Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam RPJMD untuk menghadapi persoalan tersebut?

2. Melihat target dan capaian dalam RPJMD tentu banyak kendala yang dihadapi, khususnya menuju angka indikator keberhasilan yang direncanakan.

   Pertanyaannya : bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bungo menerapkan analisis resiko yang dihadapi jika capaian yang ditetapkan diprediksi terlalu tinggi atau terlalu rendah?

3. Terkait dengan Sasaran OPD, Program OPD dan Indikator Program OPD. Setelah Fraksi Gerindra

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

membaca dan mempelajari buku Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, disebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan yang disebabkan OPD di lingkunagn Kabupaten Bungo yang belum semuanya memiliki SOP, dan disamping itu juga belum terintegrasinya aplikasi *e-government* di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo dan menambah lambatnya kinerja pemerintah daerah. Sehingga terjadi banyak kegiatan yang belum mendukung tujuan pembangunan daerah.

Pertanyaannya **:** Bagaimana menghadapi hal tersebut? Apakah hal tersebut yang mendasari perubahan RPJMD yang terkait dengan Sasaran OPD, Program OPD dan Indikator Program OPD?

.....Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat.....

Fraksi Gerindra mengharapkan agar materi yang telah disampaikan dalam Perubahan RPJMD 2016-2021 ini bisa menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan Perubahan RPJMD ini harus benar-benar sesuai dengan Peaturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Karena setiap pembangunan harus efektif, efisien dan fungsional. Jika Ranperda ini telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada maka Fraksi Gerindra menyarankan, dengan adanya misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka perlu adanya perencanaan matang dalam implementasi Ranperda tersebut, yang nantinya dalam berbagai kegiatan alokasi dana, sehingga

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

lebih efektif dan efisien. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang direncanakan dalam Ranperda RPJMD 2016-2021 perlu ditingkatkan, agar seluruh kegiatan tersebut nantinya dapat diselesaikan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan berkualitas.

FRAKSI PKS

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta Hadirin yang berbahagia.....

Mengawali pandangan umum ini, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengajukan perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, seperti yang telah di jelaskan alasan dilakukannya perubahan atas Perda tersebut ialah adanya penyesuaian dengan kebijakan nasional baik berupa Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang terinci dalam Nota Pengantar Bupati pada tanggal 13 Agustus 2018 yang lalu. Kami percaya hal ini sebagai keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan Visi Daerah yakni Bungo Maju dan Sejahtera.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta Hadirin yang berbahagia

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Setelah melakukan tela'ah terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, dalam hal ini Fraksi PKS perlu memberikan pandangan umum sebagai berikut :

1. Adanya peleburan, pemisahan dan penggabungan perangkat daerah sebagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

   Dengan kebijakan tersebut semoga dapat meningkatkan kinerja terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan nilai dan peringkat pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Sebagaimana yang tersaji dalam Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dalam sub bab Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mendapat ranking yang sangat rendah di banding tahun sebelumnya. Harus ada langkah strategis dari Pemerintah Daerah agar semua OPD menerapkan SPM dan SOP serta terintegrasi dengan aplikasi e-government.

Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyikapi masalah tersebut?

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

2. Pada RPJMD awal terdapat 7 Bidang permasalahan dan pada Perubahan RPJMD 2016-2021 yang di ajukan di rampingkan menjadi 5 bidang permasalahan meliputi Bidang Infrastruktur, Bidang Pengembangan SDM, Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Ekonomi. Selanjutnya dengan adanya permasalahan tersebut terkait dengan isu strategis internal dan eksternal yang menjadi acuan langkah untuk menjalankan roda pemerintahan selanjutnya. Apa alasan utama sehingga perubahan cukup pada 5 bidang tersebut?
3. Mohon penjelasan pada tabel 7.2 Program prioritas bidang Pendidikan pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan kenapa tidak/belum di cantumkan target dari Tahun 2018-2021.
4. Bila dibandingkan dengan RPJMD Tahun 2016-2021 sebelum di ubah dengan RPJMD perubahan terdapat satu kolom yang di hilangkan yaitu kolom keterangn satuan apa yang dipakai dalam menentukan target, misalnya persen (%), orang, unit atau yang lainnya, menurut kami hal ini penting untuk memudahkan membaca target yang ditetapkan.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

5. Pada tabel 7.2 tentang Indikasi Rencana Program Prioritas kode 2.10.15 pada Program Komunikasi dan Informatika target yang di tetapkan bahkan sampai berakhirnya periode RPJMD terlalu kecil yakni masih di bawah 5%. Apakah yang melandasi hal ini, mohon penjelasannya?

FRAKSI RESTORASI KEBANGKITAN BANGSA

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa (F-RKB) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Peubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kebupaten BungoTahun 2016-2021. Dengan semangat kemerdekaan yang tertanam di hati, Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa akan memberikan Pandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Peubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kebupaten Bungo Tahun 2016-2021, Sebagai Berikut:

1. Besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat menunujukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo begitu serius dalam upaya pembangunan manusia, Dalam pandangan Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa pemerintah daerah perlu melakukan distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang Pendidikan dan kesehatan. Untuk itu **Fraksi Restorasi**

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Kebangkitan Bangsa perlu mendapatkan masukan dan informasi dari pemerintah daerah berkenan dengan persentase besaran alokasi belanja publik di bidang Pendidikan dan kesehatan pada Perubahan RPJMD 2016-2021. **MOHON TANGGAPAN**.

2. Pengurangan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan prioritas kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten Bungo. Semakin banyak jumlah penduduk dengan kategori sejahtera maka akan semakin berhasil penyelenggaraan suatu pemerintah. Meskipun komitmen dan kesungguhan pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pengentasan kemiskinan sangatlah kuat, namun hal itu tidak terjabar secara mendetail didalam strategi dan program pembangunan daerah. Dengan demikian akan sulit dan tidak tergambar sama sekali kinerja yang akan dicapai dalam masalah penanggulangan kemiskinan hingga tahun 2021. **Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa** Mengharapakan agar berbagai langkah kebijakan dan Program kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan RPJMD 2016-2021 yang ditujukan untuk penanggulangan masalah kemiskinan dapat ditambah secara mendetail serta menjadi perhatian dan prioritas dalam kebijakan pembangunan. **MOHON TANGGAPAN**.

3. Menurut Hemat Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa Di dalam Pendapatan dan Belanja APBD Setiap tahunnya,

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara anggaran/belanja untuk aparatur dengan anggaran/belanja untuk program kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat. Belanja untuk aparatur masih relatif tinggi sementara belanja untuk peningkatan sarana prasarana, bantuan sosial, bagi hasil kedesa relatif tetap. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Bungo mengubah paradigma APBD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat? **MOHON TANGGAPAN.**

4. Fraksi restorasi Kebangkitan Bangsa secara Umum Mengapresiasi langkah Pemerintah Derah dalam penyusunan Perubahan RPJMD 2016-2021. Namun, Pemerintah Daerah Harus memastikan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo mampu menterjemahkan dan mengurai secara detail isi serta maksud dari rencana Perubahan RPJMD ini. Untuk itu, Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa perlu mengetahui sejauh mana Komitmen serta pemahaman seluruh OPD tentang Perubahan RPJMD mengingat Perubahan RPJMD ini hanya Menyisakan waktu kurang Tiga Tahun Lagi. **MOHON TANGGAPAN.**

5. Pendapatan Asli Daerah seyogyanya mampu memberikan kontribusi untuk belanja daerah, sektor ini seharusnya menjadi penopang utama untuk pendapatan daerah, Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Potensi PAD di sisa waktu yang ada dalam

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

menjalankan RPJMD 2016-2021. **MOHON TANGGAPAN.**

FRAKSI BINTANG PEMBANGUNAN

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Dalam memberikan pemandangan umum terhadap Ranperda Tentang Perubahan atas perda nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 ini, Fraksi Bintang Pembangunan mengawali dengan memberikan apresiasi yang tinggi Kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang telah bekerja keras dalam menyiapkan Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021.

Menurut Fraksi Bintang Pembangunan RPJMD perubahan ini, maupun RPJMD yang sudah berakhir maupun sedang berjalan, harus kita kaji secara komprehensif dengan membandingkan hasil pencapaiannya sehingga kita mampu mencapai VISI, MISI yaitu Bungo Maju dan Sejahtera. Kami minta kepada pihak Eksekutif dalam Pembahasan Perubahan RPJMD ini agar selalu melengkapi dengan data-data sebelumnya, sehingga kita dapat secara transparan dan mampu secara nyata mengetahui dan memahami, mampu menjawab serta mensinkronisasikan dengan RPJMD Nasional, RPJMD Provinsi dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo.

Faksi Bintang Pembangunan mengingatkan bahwa Pendidikan untuk semua warga adalah amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 disamping itu pendidikan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

merupakan salah satu poin dari Visi Misi Saudara Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu kami harapkan agar terjaminnya akses dan layanan pendidikan dengan arah kebijakan pada tahun ke-3 Pemerataan Tenaga Pendidik disemua wilayah benar-benar dapat terealisasi sehingga tidak ada penumpukkan Tenaga Pendidik hanya pada sekolah yang berada dilingkungan kota.

Berdasarkan Misi ke V Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian, perkebunan dan lembaga ekonomi masyarakat dengan sasaran terwujudnya peningkatan kesehteraan petani. Maka dengan ini kami dari Fraksi Bintang Pembangunan berharap agar program-program pada perubahan RPJMD dapat menyentuh kepentingan masyarakat, antara lain Pemerintah dapat langsung melakukan program Replanting atau peremajaan tanaman karet yang tidak produktif diganti dengan tanaman kepala sawit.

Pemekaran merupakan dambaan mayarakat dalam mempercepat pembangunan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan hingga ke pedesaan. Kesejahteraan merupakan salah satu Visi Misi Saudara Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, patut kiranya seluruh lapisan masyarakat bahu membahu bersama Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Dimana masa jabatan Suadara Bupati dan Wakil Bupati kurang lebih 3 tahun lagi, apakah Pemekaran tersebut dapat terealisasi?

Kami dari Fraksi Bintang Pembangunan menanyakan kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Apakah dalam penyusunan perubahan atas RPJMD Kabupaten Bungo Tahun

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

2016-2021 apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah ?

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.....

Fraksi Bintang Pembangunan berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Saudara Bupati dan jajarannya.

Rapat Sidang Dewan, Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bungo terhadap Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021. Semoga Pandangan Umum Fraksi-Fraksi ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dan dapat memberi penjelasan secara detail terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bungo.

Atas segala perhatiannya Kami ucapkan banyak terima kasih, dan maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pencerahan Jalan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten yang kita cintai.Aamiin

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Sebelum kami tutup, izinkan Kami menyampaikan Pantun :

Pergi ke taman Tampoenek berakhir Pekan,

Tamannya elok indah dipandang,

Pandangan Umum dari Fraksi telah disampaikan,

Mohon ditanggapi di Paripurna mendatang,

Billahi Taufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada **Sdr. Z. ARIFIN, S.H. M.H**

Setelah kita mendengarkan Pandangan Umum Fraksi DPRD melalui juru bicara Fraksi Golkar tadi, maka sesuai dengan mekanisme persidangan di DPRD, diminta kpada Pemerintah Kabupaten Bungo untuk menanggapinya sesuai dengan materi pertanyaan, tanggapan dan saran atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia...

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, sebelum acara ini diskor, kami masih mengharapkan kehadiran kita semua pada rapat paripurna DPRD berikutnya, yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD.

Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah bersedia hadir serta kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sekiranya terdapat kekurangan di dalam jalannya Rapat Paripurna Dewan ini. Semoga Alah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

bimbingan dan petunjukNya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhirnya dengan mengucapkan "Ahamdulillah hirobbil'alamin Rapat Paripurna DPRD hari ini secara resmi Saya Skor, semoga Allah SWT meridoi semua niat dan usaha baik bersama.

----------***Ketukan Palu 1x***----------

Sekian dan terima kasih

Wabillahitaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembawa Acara : Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini terimakasih.

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Muara Bungo 20 Agustus 2018

DPRD KABUPATEN BUNGO

Wakil Ketua,

SARKONI SYAM

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/